

## **PARTISIPASI PERANTAU; *BASAMO MAMBANGUN* NAGARI DI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM**

**Annisa Aulia Putri**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

*Annisaau5@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*Nagari Sungai Pua is one of the nagari located in Sungai Pua District, Agam Regency. Since the Dutch colonial era, the people of Nagari Sungai Pua generally have preferred entrepreneurship in the overseas or outside of the nagari area. Therefore, the emigrants of Nagari Sungai Pua have spread everywhere and have a structured organization called the Family Association of Emigrants of Sungai Pua or Ikatan Keluarga Perantau Sungai Pua (IKPS). Although migrating, the emigrants remain residents of Nagari Sungai Pua who also have an obligation to build Nagari. Development in Nagari Sungai Pua is already quite high. In general, every development activity involves emigrants, especially in terms of funding. One example is the construction of the Wali Nagari Sungai Pua office, where 1.3 billion (65%) of the budget came from non-governmental organizations, while another 700 billion (35%) came from the Nagari Funds Allocation. In addition, the construction of religious facilities in each jorong is also built using emigrants. This study aims to describe the participation of emigrants in development in Nagari Sungai Pua. The research method used was qualitative with the technique of collecting data on interviews with Secretary of Nagari Sungai Pua and documentation. Type of research is descriptive analysis. The conclusion of this study is the participation of emigrants in development in Nagari Sungai Pua high. Based on the development data from 2008 to 2016, the highest percentage of sources of development funding is through community self-help, which is funds collected from emigrants.*

**Keywords:** *emigrants, development, participation*

### **ABSTRAK**

Nagari Sungai Pua merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, masyarakat Nagari Sungai Pua pada umumnya lebih senang berwirausaha di rantau. Oleh karena itu, perantau Nagari Sungai Pua sudah tersebar dimana-mana dan memiliki organisasi yang terstruktur yang disebut Ikatan Keluarga Perantau Sungai Pua (IKPS). Walaupun merantau, para perantau tetap merupakan warga Nagari Sungai Pua yang juga memiliki kewajiban untuk membangun Nagari. Pembangunan di Nagari Sungai Pua sudah tergolong tinggi. Pada umumnya, setiap kegiatan pembangunan melibatkan perantau, terutama dalam hal pendanaan. Salah satu contohnya adalah pembangunan kantor Wali Nagari Sungai Pua, dimana 1,3 M (65%) anggaran berasal dari swadaya masyarakat, sedangkan 700 juta lagi (35%) berasal dari Alokasi Dana Nagari. Selain itu, pembangunan fasilitas keagamaan di tiap jorong juga dibangun dengan menggunakan uang perantau. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perantau dalam pembangunan di Nagari Sungai Pua. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan Sekretaris Nagari Sungai Pua, dan dokumentasi. Tipe penelitian analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah partisipasi rantau dalam pembangunan di Nagari Sungai Pua tinggi. Berdasarkan data pembangunan mulai tahun 2008-2016, persentase sumber pendanaan pembangunan paling banyak melalui swadaya masyarakat, yang merupakan dana yang dikumpulkan dari perantau.

**Kata Kunci** : Perantau, Pembangunan, Partisipasi

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha tanpa akhir, pembangunan bukan berarti peningkatan pendapatan masyarakat saja, namun pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem serta aktivitas dalam hal ekonomi dan sosial dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan diarahkan pada semua faktor dan semua wilayah, termasuk perdesaan. Pembangunan di perdesaan penting untuk diperhatikan, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di perdesaan.

Menurut Inayatullah, pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan memungkinkan warganya memperoleh kontrol terhadap diri mereka sendiri (Suryono, 2001). Sedangkan Todaro menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia (Todaro, 2000).

Dharmawan mengungkapkan pembangunan sebagai sebuah pergeseran yang berjalan secara gradual dan tak berulang yang didalamnya diisi oleh usaha-usaha atau realisasi atas rencana-rencana yang dibuat secara rinci dan mencakup tema-tema penting kehidupan sebagai pokok perubahan dan pertumbuhan atau

perbaikan. Selanjutnya Katz mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai.

Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini akan dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama apabila mendapat tanggapan positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahannya proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Adapun tujuan dari pembangunan (Adisasmita, 2006), yaitu :

- a. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan
- b. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh masyarakat setempat, dunia usaha, dan masyarakat umum
- c. Terlaksananya sejumlah investigasi dalam berbagai sektor
- d. Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta

Diaturinya otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan keleluasaan untuk pemerintah daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pembangunan. Otonomi daerah semakin terasa dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, yang secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah desa diberi kebebasan untuk melakukan program pembangunan, dan didukung dengan bantuan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik, dan dana desa untuk pembangunan non fisik.

Dalam pembangunan desa, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan. Bratakusumah menyebutkan bahwa paradigma pembangunan yang sangat dikembangkan saat ini adalah paradigma pemberdayaan yang berintikan partisipasi masyarakat. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan, dan pemerintah merupakan intermediasi dan katalisator perencanaan pembangunan (Melis & dkk, April 2016). Partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Agar upaya pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan.

Merantau merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, yang pada dasarnya banyak dilakukan kaum laki-laki, dimana sesuai dengan pepatah minang, "*karatau madang dihulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, dirumah panguno balun*" (Ermita, zsmelia, & mameli, 2013) .

Perantau masih termasuk kedalam masyarakat desa, jadi perantau juga memiliki peran dalam melaksanakan pembangunan, terutama dalam persoalan dana. Perantau tidak bisa berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, namun bisa memantau dan berpartisipasi dalam pelaksanaan terutama dalam hal penyaluran bantuan dana.

Partisipasi pada hakikatnya merupakan pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Partisipasi mempunyai lingkup dan tingkatannya sendiri-sendiri, tergantung darimana kita memandang partisipasi tersebut. Keith Davis mendefinisikan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Melis & dkk, April 2016). Pada dasarnya, penjelasan dari Davis tentang partisipasi adalah pelibatan masyarakat secara sadar, yang menyangkut keterlibatan diri pribadi, dan berujung pada rasa tanggung jawab serta menjadi penyumbang terbesar dalam kelompok, bukan hanya berdasarkan keterlibatan fisik dalam pekerjaannya semata.

Partisipasi masyarakat akan memastikan bahwa keperluan dan aspirasi masyarakat tersebut tidak diabaikan dan hasilnya adalah anggota masyarakat akan mendapat didikan dan diberdayakan.

Menurut Adi, partisipasi pembangunan dapat dilihat dalam empat tahap (Adi, 2001), yaitu

a. Tahap *Assesment*

Yaitu tahap mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini, masyarakat terlibat aktif melihat permasalahan yang terjadi. Masyarakat yang mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga terlihat

disini bahwa pembangunan tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.

b. Tahap alternatif program atau kegiatan

Yaitu tahap dimana masyarakat mengajukan usul terkait alternatif program dari permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap awal. Tahap ini merupakan tahap pengambilan keputusan terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia.

c. Tahap Pelaksanaan program atau kegiatan

Tahap dimana program yang sudah direncanakan dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Dalam hal ini, pelibatan masyarakat lebih ditekankan pada partisipasi dalam bentuk bantuan tenaga dan sumbangan dana. Pada tahap ini juga ditekankan sikap gotong royong masyarakat. Tanpa ada gotong royong, pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik karena pelaksanaan pembangunan yang baik tumbuh dari kesadaran dan kepedulian masyarakat dengan sifat sukarela dan senang hati.

d. Tahap evaluasi

Tahap dimana evaluasi dilakukan oleh masyarakat terhadap jalannya pembangunan, ataupun hasil yang didapatkan dari pembangunan tersebut.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diartikan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembangunan berada pada setiap level tahapan pembangunan. Artinya, pembangunan tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan masyarakat. partisipasi dapat bersifat semu apabila perilaku yang diperlihatkan bersifat sementara dan sangat jauh dari apa yang diharapkan, dengan kata lain tidak dengan kesediaan psikologis yang sesungguhnya, sebaliknya, partisipasi dapat bersifat parsial apabila perilaku

yang ditampilkan hanya sebagian dari yang sesungguhnya diharapkan, tetapi nantinya akan menjadi lengkap apabila sesuai atau mendekati yang diharapkan.

Dalam hal partisipasi perantau, hal ini berfokus pada tahap kedua dalam keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Hal ini lebih ditekankan pada perantau ikut terlibat dalam pembangunan, yaitu melalui sumbangan dana yang diberikan lewat organisasinya. Jadi, walaupun para perantau tidak berada di Nagari tersebut saat pembangunan dilaksanakan, namun mereka tetap berpartisipasi, dengan cara memberikan bantuan dana untuk melaksanakan pembangunan.

Nagari Sungai Pua merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Sungai Pua, yang mana masyarakatnya umumnya merantau. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan pertanian, dan masyarakat yang kekurangan lapangan pekerjaan memilih untuk merantau, mencari pekerjaan di kota. Hal ini sudah berlangsung sejak jaman penjajahan Belanda. Walaupun merantau, para perantau Nagari Sungai Pua tidak melupakan kampungnya, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan Nagari.

Dalam hal pembangunan, Nagari Sungai Pua sudah termasuk maju. Sudah banyak pembangunan yang dilakukan Nagari Sungai Pua sejak lama. Selain itu, Nagari Sungai Pua juga terpilih masuk sembilan besar Nagari terbaik di tingkat nasional dalam lomba gotong royong (Andriansyah, 2017). Hal ini memperlihatkan bahwa semangat gotong royong masyarakat tinggi dalam membangun Nagari.

Perantau memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan di Nagari Sungai Pua, dimana hal ini sudah menjadi marwah turun temurun di masyarakat Sungai Pua. Adapun bentuk swasembada masyarakat bersama perantau yang telah tersalurkan sejak

tahun 2008-2013 sebesar Rp 24 miliar (Andriansyah, 2017).

Dalam wawancara dengan sekretaris Nagari Sungai Pua, beliau menyebutkan :

“perantau merupakan penyumbang dalam pembangunan nagari. Misalnya dalam pembangunan kantor wali nagari, 65% menggunakan swadaya masyarakat, yang merupakan hasil dari swadaya rantau, dan 35% dari Alokasi Dana Desa. Selain itu, untuk pembangunan masjid, selesai dalam jangka waktu tiga tahun, dan dibangun dengan anggaran Rp 1,4 miliar berasal dari rantau” (Wawancara dengan ibu Masneli, S.Pi., Sekretaris Nagari Sungai Pua, Kamis, 27 Oktober 2017 pukul 11.00)

Untuk dapat menyalurkan partisipasinya, perantau Nagari Sungai Pua memiliki organisasi, yaitu Ikatan Keluarga Perantau Nagari Sungai Pua (IKPS). Organisasi ini merupakan bentuk ikatan dan kekompakan masyarakat rantau yang tidak melupakan kampung halamannya.

“sebelum melaksanakan pembangunan, rencana tersebut disampaikan kepada pengurus IKPS, kemudian mereka mulai mengkomunikasikan dengan perantau untuk membantu pembangunan tersebut” (Wawancara dengan ibu Masneli, S.Pi., Sekretaris Nagari Sungai Pua, Kamis, 27 Oktober 2017 pukul 11.00)

Latar belakang tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang tentang partisipasi perantau dalam pembangunan di Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi perantau

dalam pembangunan di Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Tulisan ini adalah salah satu hasil akhir dari penelitian yang berjudul Partisipasi Perantau dalam Pembangunan di Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati (Moleong, 2010). Peneliti memilih pendekatan ini karena prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara mengolah data-data berupa tulisan, kata-kata atau lisan dari orang yang ada di lokasi penelitian yang dapat diamati. Tipe penelitian bersifat deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyusun data kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya (Nawawi, 1994). Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana Peran perantau dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Puar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *Purposive sampling*. Penelitian ini dilakukan menggunakan empat tahap, yaitu pengumpulan data, interpretasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap awal peneliti akan mengumpulkan data di lapangan maupun melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan adalah data-

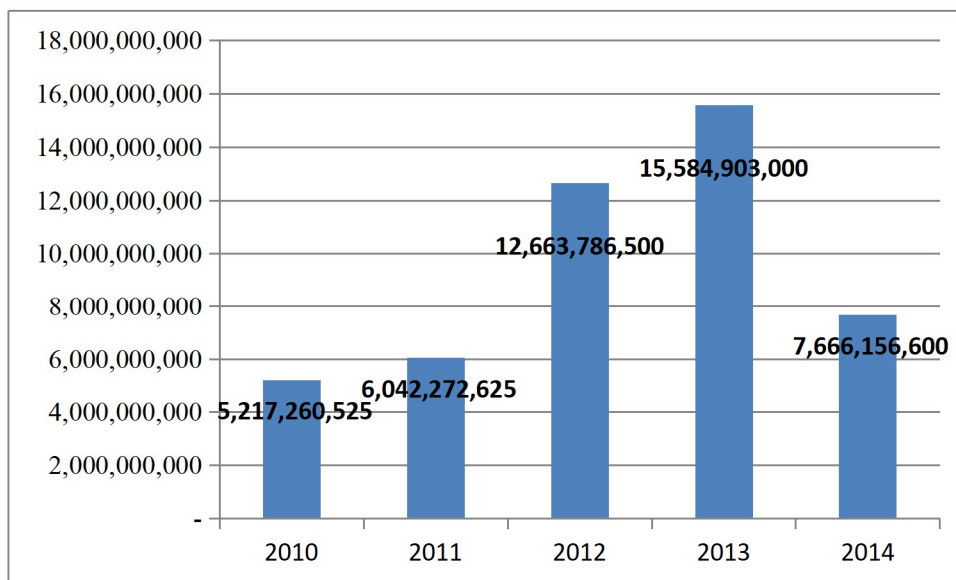
data yang terkait dengan segala aspek. Selanjutnya data-data ini akan dianalisis dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya menarik kesimpulan. Penelitian ini menjadikan Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam sebagai lokus penelitian. Tingkat pembangunan di Nagari Sungai Pua sudah tergolong tinggi. Pada tahun 2014, Nagari Sungai Pua masuk ke dalam sembilan desa terbaik di Indonesia, dalam melakukan program gotong royong dalam pembangunan. Gotong Royong yang dilakukan bukan hanya menggunakan

tenaga, tetapi perantau yang sedang tidak berada dilokasi bisa ikut berpartisipasi dengan cara menyalurkan swadaya ke nagari untuk melakukan pembangunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembangunan di Nagari Sungai Pua

Sejak tahun 2010, pembangunan di Nagari Sungai Pua sudah tergolong tinggi. pembangunan tersebut berfokus pada pembangunan fisik, untuk memperbaiki sarana dan prasarana Nagari penunjang kegiatan masyarakat.



Gambar 1

#### Pembangunan di Nagari Sungai Pua tahun 2010-2014

Sumber : Laporan Swadaya dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari Sungai Pua tahun 2010-2014, diolah.

Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa pembangunan Nagari Sungai Pua mengalami peningkatan dari tahun 2010-2013, dan mengalami penurunan di tahun 2014. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014, pembangunan fisik sudah mulai dikurangi karena sebagian besar pembangunan sudah selesai ditahun sebelumnya.

“...di tahun 2014 pembangunan tidak terlalu tinggi, hal ini karena untuk pembangunan fisik sudah

banyak yang selesai di tahun sebelumnya, jadi tidak banyak yang harus dibangun...” (Wawancara dengan ibu Masneli, S.Pi., Sekretaris Nagari Sungai Pua, Kamis,27 Oktober 2017 pukul 11.00)

Pada tahun 2010, pembangunan banyak dilakukan untuk peningkatan sarana dan prasarana umum, seperti cor jalan kapalo koto, irigasi Jaruangan, cor jalan gobah, pembuatan korong

banda, dan lain-lain, dan kegiatan sosial keagamaan seperti qurban dan Baz Nagari Sungai Pua. Sedangkan untuk tahun 2011, pembangunan lebih banyak dilaksanakan untuk pembangunan sarana dan prasana pendidikan, yaitu seperti rehab labor, pembenahan beberapa sekolah dasar di Nagari Sungai Pua, pembangunan wc guru, pembangunan asrama, dan sebagainya, serta untuk kegiatan sosial keagamaan. Hampir sama dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2012 pembangunan lebih difokuskan pada program pekerjaan umum, yaitu pembangunan irigasi,

jembatan, rehab drainase, dan gorong-gorong, serta urusan sosial keagamaan, seperti peningkatan sarana dan prasarana ibadah serta qurban, BAZ Nagari, dan pinjaman modal untuk penggemukan sapi masyarakat.

Sedangkan tahun 2013, pembangunan banyak dilakukan untuk peningkatan sarana dan prasana pendidikan serta sosial keagamaan, kesehatan, dan olahraga. dan untuk tahun 2014, pembangunan didominasi oleh program pekerjaan umum, dan urusan sosial keagamaan. Beberapa pembangunan fisik yang tampak :



**Gambar 2. Cor jalan ikua Gantiang Kapalo Koto**  
*sumber: dokumentasi peneliti*



**Gambar 3. Puskesmas Kapalo Koto**  
*sumber: dokumentasi peneliti*



**Gambar 4. Asrama Putri Diniyah Limo Jurai**  
*sumber: dokumentasi peneliti*



**Gambar 5. Kantor Wali Nagari Sungai Pua**  
*sumber : dokumentasi peneliti*

## **2. Partisipasi Perantau dalam Pembangunan di Nagari Sungai Pua**

Pembangunan di Nagari Sungai Pua sudah dapat dikatakan sukses, terlihat dari penjelasan pada poin sebelumnya. Pembangunan di Nagari Sungai Pua tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat pada setiap tahap pembangunan. Perantau, yang merupakan masyarakat Nagari Sungai Pua yang tidak menetap di kampung, berpartisipasi dengan cara memberikan

bantuan berupa dana yang dikirimkan melalui IKSP.

“Dalam melaksanakan pembangunan, swadaya dari rantau dikumpulkan melalui IKSP. Program pembangunan disampaikan kepada IKSP dan mereka menyebarkan kepada perantau, lalu mengumpulkan dana dari para perantau. Dana tersebut sifatnya tidak mengikat, namun seberapa mampu para perantau menyumbang untuk

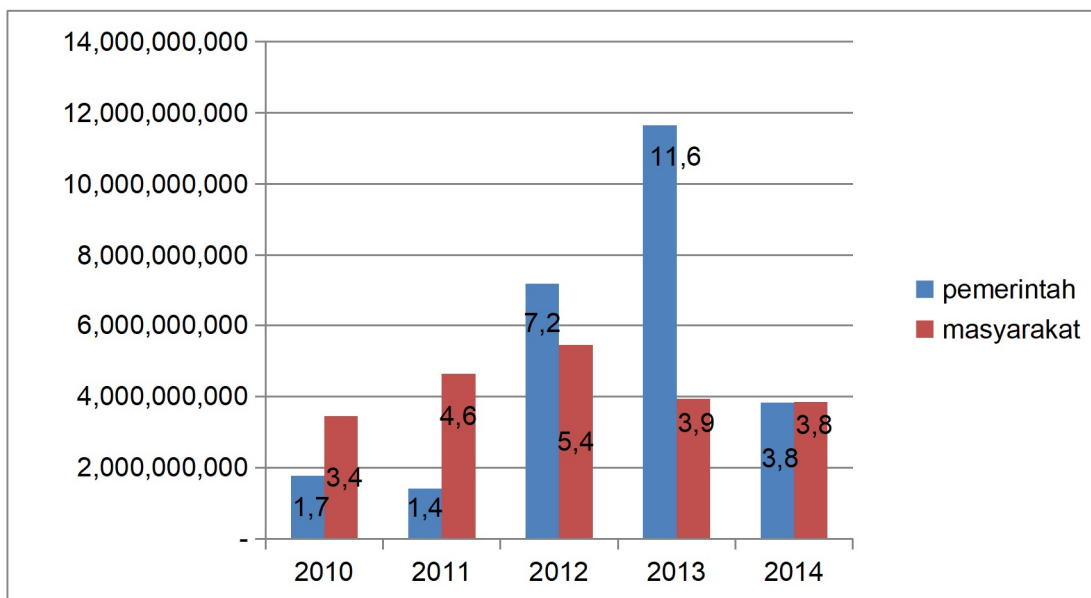


pembangunan, tidak ada paksaan” (Wawancara dengan ibu Masneli, S.Pi., Sekretaris Nagari Sungai Pua, Kamis, 27 Oktober 2017 pukul 11.00).

Dalam hal ini, pemerintah tidak menetapkan besaran yang harus dibayarkan perantau kepada Nagari, namun lebih kepada kesadaran para perantau untuk membangun. Dorongan yang tinggi untuk membangun Nagari membuat masyarakat rantau dengan suka rela menyumbang melalui IKSP untuk disalurkan kepada Nagari.

Teknis dari penyaluran swadaya rantau kepada Nagari adalah tim yang

akan melaksanakan pembangunan mengajukan proposal kepada IKSP, lalu IKSP yang mengumpulkan dana dari perantau pada saat itu juga. Jadi para perantau tidak membayarkan dalam jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu. Karena sifat sumbangan ini tidak mengikat, jadi perantau bisa memilih akan ikut memberikan sumbangan atau tidak, dan dalam jumlah berapapun. Walaupun tidak ditetapkan besaran dan jangka waktu, partisipasi rantau dalam pembangunan tetap tinggi. hal ini seperti terlihat pada diagram dibawah :



**Gambar 6.**

**Perbandingan Sumber Pembiayaan Pembangunan Menggunakan Swadaya Masyarakat Dan Pemerintah Tahun 2010-2014**

*Sumber: Laporan Swadaya dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tahun 2010-2013, diolah.*

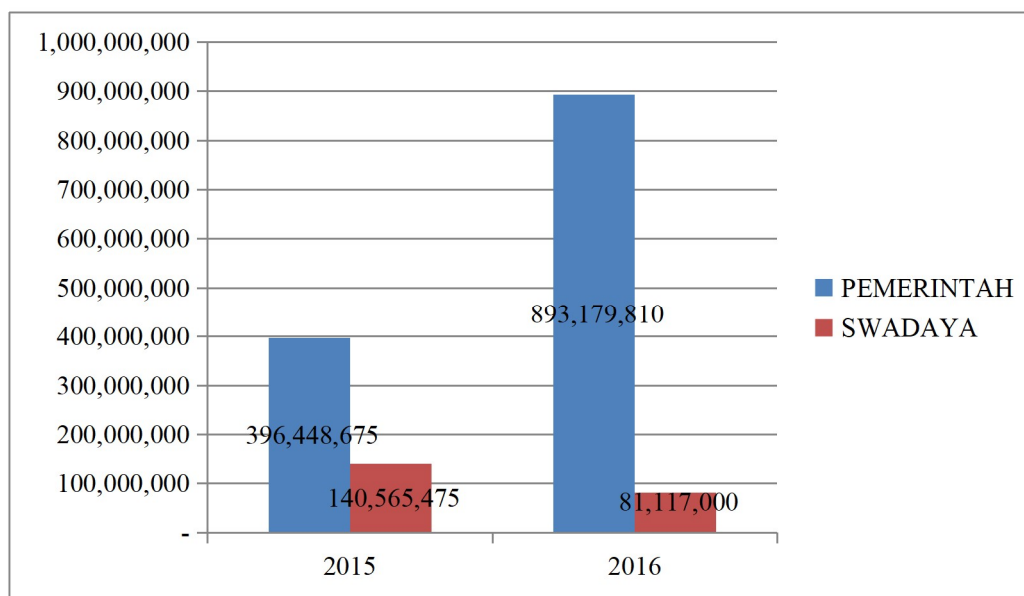
Gambar di atas memperlihatkan pada tahun 2010 dan 2011, pembiayaan pembangunan menggunakan swadaya rantau lebih tinggi dibandingkan dengan dana yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa semangat perantau tinggi dalam membangun Nagari. Sedangkan untuk tahun 2012 dan 2013, pemerintah lebih tinggi memberikan dana dalam

pembangunan. Namun, jika dilihat dari segi jumlah, perantau juga tidak sedikit memberikan dana. Dalam artian, dana pemerintah bertambah, tapi partisipasi rantau tidak hilang. Hal ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, penyaluran swadaya perantau dilakukan dengan cara memberikan proposal kepada IKSP. Jika Nagari tidak mengajukan, perantau tidak menyalurkan dana.

Partisipasi perantau dalam memberikan bantuan dana dalam pembangunan dari tahun 2010-2012 meningkat, namun menurun di tahun 2013. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2013 lebih banyak pada pembangunan infrastruktur, dan pembangunan tersebut menggunakan Alokasi Dana Desa yang pada saat itu disebut Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) sepenuhnya. Karena sudah mencukupi dari pemerintah, masyarakat tidak meminta bantuan banyak kepada perantau untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk tahun 2013 tersebut,

pemanfaatan swadaya dari perantau lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan prasarana ibadah, khatam alquran, dan BAZ Nagari Sungai Pua. Sama halnya dengan tahun 2014, pembangunan sudah banyak dilakukan melalui Alokasi Dana Desa, sehingga swadaya rantau lebih banyak dialokasikan pada pembangunan MDA, dan BAZ Nagari.

Untuk tahun 2015-2016, setelah diberlakukannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, transfer dana untuk Nagari meningkat, dan pengalokasiannya digunakan untuk pembangunan Nagari.



**Gambar 7.**

**Perbandingan Sumber Pembiayaan Pembangunan Fisik di Nagari Sungai Pua 2015-2016**

*Sumber: Laporan Swadaya dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tahun 2015-2016, diolah.*

Pembangunan Fisik tahun 2015-2016 di Nagari Sungai Pua menggunakan dana Pemerintah meningkat, berbeda dengan pembangunan menggunakan swadaya rantau. Sumber keuangan yang berasal dari pemerintah meningkat, sehingga penyusunan program pembangunan lebih banyak dilakukan menggunakan dana pemerintah. Pemaksimalan

penggunaan dana desa ini dilakukan untuk me

Partisipasi dalam pembangunan dapat dilihat dari empat tahap, yaitu tahap *assesment*, alternatif program, pelaksanaan, dan evaluasi.

**a. Tahap Assesment dan Alternatif Program**

Merupakan tahap pengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Pada tahap *assesment* dan alternatif program,

dilakukan melalui Musyawarah Nagari (Musna), dengan mengundang seluruh masyarakat untuk merumuskan pembangunan yang akan dilaksanakan. Musna dilaksanakan sebelum musrenbang dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mendiskusikan apa permasalahan utama yang harus segera dipecahkan, dan dicarikan alternatifnya.

Nagari Sungai Pua baru selesai melaksanakan Musna pada bulan Agustus lalu. Musna dilakukan dengan mengundang seluruh elemen masyarakat, dan pemerintah nagari sebagai fasilitator. Setelah masyarakat menyampaikan permasalahan yang penting untuk dipecahkan, lalu dipilih program-program yang akan ditetapkan dalam Rancangan Awal RKP untuk ditetapkan dalam musrenbang. Pada tahap ini, terlihat masyarakat berpartisipasi mulai dari tahap identifikasi permasalahan, sampai tahap penetapan program yang akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

“Nagari Sungai Pua melakukan Musyawarah Nagari sebelum melaksanakan musrenbang. Hal ini dilakukan dengan tujuan program yang dirumuskan tersebut memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena dalam musna, yang mengidentifikasi dan memilih alternatif adalah musyawarah dari masyarakat”. (Wawancara dengan ibu Masneli, S.Pi., Sekretaris Nagari Sungai Pua, Kamis, 27 Oktober 2017 pukul 11.00).

Mulai dari tahun 2015, UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah diberlakukan. Hal ini memberikan implikasi pada pembangunan di Nagari, disebabkan karena sumber keuangan nagari mulai bervariasi, dan hal ini menambah pemasukan Nagari. UU ini

berpengaruh pada swadaya yang diberikan perantau kepada masyarakat.

Sumbangan yang diberikan oleh perantau merupakan bentuk yang tidak mengikat, dimana tidak ditetapkan berapa perantau harus menyumbang untuk pembangunan. tapi, lebih kepada pemberian secara spontan dari perantau kepada nagari ketika masyarakat di nagari mensosialisasikan akan mengadakan pembangunan di nagari.

“Perantau memberikan sumbangan tidak dalam jangka waktu berkala. Tetapi pada saat akan melaksanakan pembangunan, masyarakat memberikan proposal kepada IKPS, lalu IKPS mengumpulkan dana spontan dari masyarakat tersebut, sehingga jumlah swadaya tiap tahun berbeda-beda jumlahnya, tergantung pembangunan yang dilaksanakan pada tahun tersebut” (Wawancara dengan ibu Masneli, S.Pi., Sekretaris Nagari Sungai Pua, Kamis, 27 Oktober 2017 pukul 11.00).

Hal ini mengisyaratkan bahwa program pembangunan yang disusun dalam RKP berasal dari masyarakat. karena Nagari memiliki dana yang besar untuk melakukan pembangunan, dana utama untuk melakukan pembangunan berasal dari pemerintah. perantau baru akan memberikan bantuan dana apabila diminta. Dengan meningkatnya pendanaan dari pemerintah, masyarakat hanya tinggal mencari kekurangan dana yang sedikit dari para perantau, karena pada dasarnya sudah terpenuhi oleh dana pemerintah. Hal ini terlihat pada tahun 2015 dan 2016 yaitu setelah berlakunya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Partisipasi perantau menurun di tahun 2015 dan 2016 bukan dikarenakan masyarakat rantau sudah

tidak memperdulikan, tapi karena dalam tahap *assesment* dan alternatif, diprioritaskan untuk menggunakan dana yang dimiliki nagari dari pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa perencanaan awal pembangunan di Nagari ini baik.

#### **b. Pelaksanaan Program**

Setelah selesai tahap *assesment* dan alternatif program, selanjutnya pelaksanaan program. Pelaksanaan tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat, terutama dalam hal penyediaan dana, tenaga, material, tanah, konsumsi, dan lainnya. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilakukan dengan cara gotong royong masyarakat sekitar.

“pembangunan dilaksanakan dengan gotong royong, melibatkan semua masyarakat. dalam hal ini, masyarakat bisa berpartisipasi dengan cara penyediaan bahan atau material, menyumbangkan tanah, memberikan konsumsi untuk para pekerja, menyumbangkan tenaga, uang, dan lain-lain”. (Wawancara dengan ibu Masneli, S.Pi., Sekretaris Nagari Sungai Pua, Kamis, 27 Oktober 2017 pukul 11.00).

Perantau memberikan sumbangan untuk pembangunan tidak diwajibkan. Namun, sesuai dengan kesadaran akan membangun nagari. Tidak ada aturan khusus pengambilan pungutan dari rantau untuk pembangunan. semangat gotong royong dan keinginan membangun nagari yang membuat para perantau secara sukarela memberikan sumbangan.

Walaupun tidak ada pungutan resmi dari pemerintah daerah, masyarakat rantau tetap memberikan bantuan untuk pembangunan apabila dibutuhkan. Setiap masyarakat menghubungi IKSP untuk meminta bantuan, IKSP akan langsung mengumpulkan dana dari

perantau. Kesadaran perantau yang tinggi untuk membangun Nagari di Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam sudah tergambar dalam diagram diatas (4.2 dan 4.3). Kesadaran tersebut tidak lepas dari rasa gotong royong yang tinggi diantara masyarakat. sehingga Nagari Sungai Pua berhasil meraih prestasi sembilan besar Nagari terbaik di Indonesia dalam perlombaan gotong royong masyarakat tingkat nasional tahun 2014. Pelaksanaan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Pua dapat dirasakan dengan majunya pembangunan, dan pembangunan tersebut dilaksanakan secara gotong royong, bukan hanya masyarakat yang tinggal di Nagari, tetapi juga masyarakat yang merantau sekalipun.

#### **c. Evaluasi**

Pada tahap ini, dilihat apakah pembangunan tersebut bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari pembangunan yang dilakukan dari tahun 2010-2016, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Nagari Sungai Pua. Contohnya pembangunan asrama diniyah, perbaikan jalan, pembangunan irigasi. Perantau juga dapat menikmati hasil pembangunan tersebut pada saat mudik ke kampung.

## **PENUTUP**

Pembangunan di Nagari Sungai Pua sudah dapat tergolong bagus. Saat ini fasilitas masyarakat sudah lengkap di Nagari Sungai Pua. Infrastruktur Nagari Sungai Pua juga pada umumnya sudah bagus. Keberhasilan pembangunan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Perantau, yang merupakan masyarakat Sungai Pua yang sedang tidak tinggal di Sungai Pua juga ikut terlibat dalam membangun Nagari Sungai Pua. Mereka berhimpun dalam Ikatan Keluarga Perantau Sungai

Pua. Disana mereka ikut menyumbang dalam pembangunan di Sungai Pua, yaitu dengan mengumpulkan dana melalui IKPS dan menyalurkannya ke Nagari untuk melakukan pembangunan. dana tersebut merupakan bentuk dana spontan dari masyarakat rantau, bukan dana mengikat.

Pembangunan harus dilakukan berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat. Dalam memberdayakan perantau, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu koordinasi antara masyarakat di Nagari, Pemerintah, dan Masyarakat rantau. Ikatan ketiga komponen tersebut tidak boleh terputus, karena ketiganya saling berkaitan.

## REFERENSI

Adi, I. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Adisasmita. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Andriansyah. (2017). *Antara Sumbar*. Retrieved Oktober 25, 2017, from [www.antarasumbar.com](http://www.antarasumbar.com): [http://www.antarasumbar.com/berita/133949/sungai-pua-masuk-](http://www.antarasumbar.com/berita/133949/sungai-pua-masuk-sembilan-besar-nagari-terbaik-tingkat-nasional.html?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news)

[sembilan-besar-nagari-terbaik-tingkat-nasional.html?utm\\_source=fly&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antarasumbar.com/berita/133949/sungai-pua-masuk-sembilan-besar-nagari-terbaik-tingkat-nasional.html?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news)

Ermita, zusmelia, & mameli. (2013). Peran Perantau terhadap Pembangunan di Jorong Galogandang, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu SOSial Mamangan No. 1 Vol. 1* , 1-7.

Melis, & dkk. (April 2016). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di desa Wawolesea Kecamatan Laloso, Kabupaten Konawe Utara. *Jurnal ekonomi vol 1.(1)*, 99-105.

Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, H. (1994). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suryono. (2001). *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Pers.

Todaro. (2000). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.